



universitas
MALIKUSSALEH



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

SURAT KEPUTUSAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie - Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara

Telepon: 0645-44450 / 08116798545 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 110/UN45/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 895/UN45/KPT/2020 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh maka perlu ditetapkan Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 895/UN45/KPT/2020 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh;

Memperhatikan : Usulan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama Universitas Malikussaleh Nomor 720/UN45.04.00/2022 tanggal 9 Februari 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN PANDUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Malikussaleh Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- KEDUA : Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Malikussaleh berlaku bagi Program Studi, Mahasiswa dan Unit Kerja Terkait;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 10 Februari 2022



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama Universitas Malikussaleh;
3. Dekan di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
5. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
6. Ketua SPI Universitas Malikussaleh.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM

Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa – Blang Pulo Kecamatan Muara Satu
Laman : <http://www.fhunimal.ac.id> Email: fh@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 119/UN45.1.5/KPT/2023
TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU KURIKULUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pendidikan, kurikulum perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan dengan cara merevisi kurikulum untuk beradaptasi sesuai dengan perubahan sosial dan zaman, serta mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pemberlakuan Buku Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara 1462 Tahun 2016);

97

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 312/UN45/KP.06.02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.
- KESATU : Buku Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merupakan pedoman tentang pelaksanaan proses belajar mengajar serta merupakan acuan kerja bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
- KEDUA : Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merupakan pedoman kerja bagi Dosen agar dapat mengevaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kontrak perkuliahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan Akreditasi bagi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 September 2023



Dr. Palsal, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197408182005011001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
4. Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
5. Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh,

Guna memenuhi tuntutan sesuai arah visi dan misi pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam proses belajar mengajar, termasuk penciptaan budaya pendidikan yang sehat, serta kemampuan transfer kecerdasan yang utuh, sangat ditentukan oleh tata kelola (manajemen) yang terintegrasi, komunikasi yang efektif, dan manusiawi. Usaha demikian hanya mungkin dilakukan apabila seluruh komponen fakultas memiliki komitmen yang diarahkan untuk kemajuan lembaga, ditunjang dengan sarana prasarana sebagai basis penopangnya. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh saat ini memiliki mahasiswa sejumlah 1482 mahasiswa. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh juga didukung oleh tenaga pendidik, yang terdiri dari Guru Besar, Doktor dan Magister yang lulus dari berbagai perguruan tinggi ternama di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dalam kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dapat diandalkan.

Kurikulum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sampai saat ini mengalami perubahan yang signifikan sesuai yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku. Tahun Akademik 2021 Fakultas Hukum melakukan perubahan kurikulum dengan pertimbangan kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak, sehingga kurikulum tersebut dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya kurikulum direvisi/diperbaharui. Pada tahun 2022-2023 Fakultas Hukum UNIMAL kembali melakukan perubahan kurikulum yang mengacu kepada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Hadirnya Buku Kurikulum ini, merupakan implementasi yang mengarah sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperjelas alur mekanisme sistem MBKM yang kompleks.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukit Indah, 1 September 2023
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	I
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN YURIDIS	3
C. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM.....	3
D. TUJUAN FAKULTAS HUKUM.....	4
BAB II BUKU KURIKULUM SARJANA HUKUM	6
A. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI HUKUM	6
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN.....	7
C. MATRIKS PEMBENTUKAN MATA KULIAH.....	9
D. STRUKTUR KURIKULUM.....	10
E. DESKRIPSI MATA KULIAH.....	13
BAB III PANDUAN PROGRAM MBKM	46
A. LATAR BELAKANG.....	46
B. DASAR HUKUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	46
C. TUJUAN	47
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	48
E. RUANG LINGKUP.....	48
BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MBKM.....	50
A. KETENTUAN UMUM MBKM.....	50
B. KETENTUAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	50
C. KETENTUAN FAKULTAS HUKUM	51
D. PARA PIHAK PELAKSANA MBKM.....	52
1. <i>Fakultas Hukum</i>	52

2. <i>Program Studi</i>	52
3. <i>Mahasiswa</i>	52
4. <i>Mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)</i>	52
BAB V PROGRAM KEGIATAN	54
A. KULIAH PADA PRODI DI LUAR UNIMAL.....	54
B. KULIAH PADA PRODI BERBEDA DI LINGKUNGAN UNIMAL.....	55
C. MAGANG	56
D. PERSYARATAN DAN TUGAS MAHASISWA MAGANG	57
E. KRITERITA DAN KEWAJIBAN INSTANSI TEMPAT MAGANG	58
F. PEMBIMBINGAN MAGANG.....	60
BAB VI PENJAMINAN MUTU	64
A. KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU	64
B. PENETAPAN MUTU.....	64
C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI.....	66
BAB VII PENUTUP	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1982 keberadaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dibekukan ijin operasionalnya, dan pada tahun 1986 ijin operasionalnya diberikan kembali melalui Surat Keputusan Kopertis Wilayah I Medan Nomor 029A/Kop.I/ 1986, dan berada di bawah Universitas Malikussaleh. Universitas Malikussaleh memperoleh Status Terdaftar dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0584/O/1989 tertanggal 11 September 1989, termasuk di dalamnya Fakultas Hukum dengan Jurusan Hukum Keperdataan. Melalui Konsorsium Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keperdataan dileburkan menjadi Program Studi Ilmu Hukum dengan kurikulum yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional bagi Program Sarjana Ilmu Hukum. Sejak dinegerikan, Fakultas Hukum mulai mengembangkan kualitas diri, baik yang terkait dengan proses pembelajaran, pengembangan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dan pengembangan program studi.

Berdasarkan kebijakan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tentang Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum: SK Dekan Nomor 290/UN45.5/KPT/2019 tentang Pemberlakuan Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum, selanjutnya ditetapkan Kurikulum berbasis KKNI berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 3184/UN45/HK/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Kebijakan terkait Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Sebagai langkah revolusioner dalam dunia pendidikan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadopsi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Keputusan ini tidak hanya sekadar perubahan namun mencerminkan komitmen yang kuat untuk

menghadirkan pendidikan hukum yang relevan, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dasar berlakunya kurikulum ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika perkembangan ilmu hukum, tantangan global, dan perspektif kebebasan belajar.

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya kebebasan akademik dan inovasi dalam pengembangan kurikulum, sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 mengenai Perguruan Tinggi memberikan otonomi yang cukup besar kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh memanfaatkan ruang lingkup otonomi ini untuk merancang Kurikulum Merdeka Belajar yang mencerminkan identitas lokal, nasional, dan internasional.

Dasar kurikulum ini berasal dari pemahaman mendalam bahwa dunia hukum terus berkembang. Oleh karena itu, kurikulum ini menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Kebebasan belajar diberikan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum sesuai minat dan passion mereka. Kurikulum ini didasarkan pada pandangan bahwa keahlian dalam hukum tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam terhadap hukum nasional tetapi juga pemahaman global. Mahasiswa didorong untuk memahami hukum dalam konteks lokal, nasional, dan internasional, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif di berbagai tingkatan.

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menekankan pengembangan soft skills seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks dan mengharapkan lulusan hukum yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang kuat. Dengan dasar hukum yang kuat dan visi yang jelas, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melangkah maju menuju era pendidikan hukum yang lebih dinamis, relevan, dan merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan sikap mahasiswa untuk menghadapi tantangan masa depan.

B. Landasan Yuridis

Secara yuridis penyusunan kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Hukum berlandaskan pada:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Visi dan Misi Fakultas Hukum

Visi

Menjadi Fakultas Unggul Dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal

Misi

- a. Menyelenggarakan layanan pendidikan hukum yang bermutu dan profesional secara merata dengan berbasis potensi lokal;
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian hukum yang bermutu dengan berbasis potensi lokal untuk pengembangan ilmu hukum dan meningkatkan kualitas hidup serta peradaban yang mampu membawa keunggulan di tingkat Internasional;

- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, yang berorientasi pada kehidupan aman, damai, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya Fakultas Hukum yang berkualitas.

D. Tujuan Fakultas Hukum

Secara umum penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang bermoral memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam bidang ilmu hukum;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan atau profesional tenaga kependidikan dan pegawai;
3. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
4. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat serta dapat memecahkan persoalan/permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
5. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi; dan
6. Menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan keterampilan dalam bidang hukum.

2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

BAB II

BUKU KURIKULUM SARJANA HUKUM

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)

A. Profil Lulusan Program Studi Hukum

NO.	PROFIL & DESKRIPSI LULUSAN
1	PENEGAK HUKUM Penegak hukum Indonesia terdiri atas Hakim, Polisi, Jaksa, Pengacara yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan.
2	LEGAL DRAFTER Pembuat peraturan dan kontrak hukum yang professional pada instansi atau perusahaan
3	LEGAL OFFICER Pengelola dokumen, perijinan, pemberi opini hukum dan pemberi solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan
4	ADVOKASI Pembela dan Pendamping masyarakat yang mengalami permasalahan hukum
5	KONSULTAN HUKUM Mampu memberikan nasehat- nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. Tindakan dan perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah diluar pengadilan (non-litigation).
6	PENDIDIK Mampu mengembangkan profesi sebagai dosen dan/atau berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

Ranah	Kode	Capaian Pembelajaran Lulusana
Sikap (S1)	CPIs-1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	CPIs-2	Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
	CPIs-3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
	CPIs-4	Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
	CPIs-5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
	CPIs-6	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
Pengetahuan (P)	CPIp-7	Menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan khusus.
	CPIp-8	Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah pada bidang hukum
	CPIp-9	Mempunyai kemampuan dalam mengalisis permasalahan bidang hokum
	CPIp-10	Mempunyai kemampuan penyelesaian masalah / sengketa hukum secara sistematis dan prosedural.
	CPIp-11	Mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan yang benar berdasarkan analisis informasi dan data.
	CPIp-12	Mempunyai kemampuan dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri dan/atau kelompok.

Kemampuan Umum (KU)	CPLku-13	Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah
	CPIku-14	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan nilai keilmuan hukum.
	CPIku-15	Mampu menyelesaikan permasalahan dengan memformulasikan masalah secara sistematis dan prosedural
	CPIku-16	mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CPIku-17	Mampu memberikan arahan dalam memilih berbagai solusi alternatif dalam keilmuan hukum baik secara mandiri dan/atau kelompok.
	CPIku-18	Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi pada pekerjaan sendiri maupun kelompok.
Kemampuan Khusus (KK)	CPIku-19	Mampu berwirausaha dan memimpin organisasi kepengacaraan atau advokad
	CPIkk-20	Mampu membuat rancangan kontrak atau perjanjian (<i>contract drafting</i>).
	CPIkk-21	Mampu menyusun rancangan peraturan perundang-undangan (<i>legislative drafting</i>).
	CPIkk-22	Mampu membuat surat kuasa, surat gugatan dan menyusun replik, duplik, memori banding, serta memori kasasi.
	CPIkk-23	Mempunyai keahlian dalam praktek persidangan, baik dalam bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara.
	CPIkk-24	Mempunyai keahlian menyampaikan gagasan, berargumentasi terhadap persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.

D. Struktur Kurikulum

Mata Kuliah Semester I (PEMBELAJARAN DI PRODI/MKWU DAN MK KEPRODIAN)					
Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HUT1212	Hukum Islam	2	Utama	Tanpa Syarat
2	MKU0112	Pendidikan Agama	2	Wajib Nasional	PreTest
3	HUT0113	Pengantar Ilmu Hukum	3	Utama	Tanpa Syarat
4	HUT0213	Pengantar Hukum Indonesia	3	Utama	Tanpa Syarat
5	MKU0411	Bahasa Indonesia	1	Pendukung	Tanpa Syarat
6	HIB0312	Bahasa Inggris Hukum	2	Pendukung	Tanpa Syarat
7	MKU0212	Pancasila	2	Pendukung	Tanpa Syarat
8	MKU0312	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Pendukung	Tanpa Syarat
9	MKU0511	Kemalikhassalehan	1	Pendukung	Tanpa Syarat
10	MKU0612	Teknologi Informasi dan Kewirausahaan	2	Pendukung	Tanpa Syarat
Jumlah SKS			20		
Mata Kuliah Semester II (PEMBELAJARAN DI PRODI/MKWU DAN MK KEPRODIAN)					
Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HIT1022	Hukum Pidana Islam	2	Kearifan Lokal	Hukum Islam
2	HIS0322	Sosiologi Hukum	2	Pendukung	PHI & PIH
3	HUT1323	Hukum Adat	3	Utama	PIH & PHI
4	HIS0122	Antropologi Hukum	2	Pendukung	PIH & PHI
5	HUT0322	Ilmu Negara	2	Utama	PIH & PHI
6	HUT0523	Hukum Pidana	3	Utama	PIH & PHI
7	HUT0423	Hukum Perdata	3	Utama	PIH & PHI
8	HIT0723	Hukum Waris Islam dan Adat	3	Kearifan Lokal	Hukum Islam
Jumlah SKS			20		
Mata Kuliah Semester III (PEMBELAJARAN DI PRODI/MK KEPRODIAN)					
Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HIT1232	Hukum Ekonomi Islam	2	Pendukung	Hukum Islam
2	HIT0832	Hukum Perkawinan	2	Pendukung	H. Islam & H. Perdata
3	HUT0633	Hukum Tata Negara	3	Utama	Ilmu Negara
4	HUB0232	Hukum Acara Pidana	2	Pendukung	Hukum Pidana
5	HUB0132	Hukum Acara Perdata	2	Pendukung	Hukum Perdata
6	HUT0733	Hukum Administrasi Negara	3	Utama	Ilmu Negara
7	HUT0833	Hukum Dagang	3	Utama	Hukum Perdata
8	HIT0132	Hukum Pidana Khusus	2	Pendukung	Hukum Pidana
9	HUB1332	Peradilan Islam	2	Pendukung	Tanpa Syarat
10	HIB1731	Pendidikan Anti Korupsi	1	Pendukung	Tanpa Syarat
11		Mata Kuliah Kekhususan	2	Pendukung	Lulus 40 SKS
Jumlah SKS			24		

Mata Kuliah Semester IV (PEMBELAJARAN DI PRODI/MK KEPRODIAN)

Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HIT1542	Kejahatan Mayantara	2	Pendukung	Hukum Pidana
2	HIT1442	Hukum Pidana Ekonomi	2	Pendukung	Hukum Pidana
3	HUB0442	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Utama	HTN & HAN
4	HUB0342	Hukum Acara PTUN	2	Utama	HTN & HAN
5	HIB0442	Kapita Selektika Hukum Islam	2	Pendukung	Hukum Islam
6	HIS0242	Hukum HAM dan Humaniter	2	Pendukung	HTN & HAN
7	HIT0242	Hukum Perikatan	2	Pendukung	Hukum Perdata
8	HIB0142	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2	Pendukung	H. Perdata & H. Dagang
9	HUT0942	Hukum Internasional	2	Utama	PIH, PHI & HTN
10	HIB0542	Filsafat Hukum	2	Pendukung	PIH & PHI
11		Mata Kuliah Kekhususan	4		lulus 40 sks
Jumlah SKS			24		

Mata Kuliah Semester V (PEMBELAJARAN DILUAR PT/MAGANG)

Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HUB0652	PKH Acara Perdata& Peradilan Adat	2	Utama	Acara Perdata& H. Adat
2	HUB0752	PKH Acara Pidana & Acara Jinayah	2	Utama	Acara Pidana & Peradilan Islam
3	HUB0852	PKH Acara TUN	2	Utama	H. Acara TUN
4	HUB0952	Praktek Perancangan Kontrak	2	Utama	H. Perikatan
5	HUB1052	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2	Utama	HTN & HAN
6	HUB1152	PKH Acara Mahkamah Konstitusi	2	Utama	H. Acara MK
7	HUB0554	Metode Penelitian Hukum	4	Utama	Lulus 80 SKS
8	HIT0352	Hukum Perbankan	2	Utama	Hukum Dagang
10		Mata Kuliah Kekhususan	4	Pendukung	lulus 40 SKS
Jumlah SKS			22		

Mata Kuliah Semester VI (PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI DALAM PT)

Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HIT1162	Hukum Laut Internasional	2	Pendukung	H. Internasional
2	HIT0562	Hukum Perdata Internasional	2	Pendukung	H. Perdata, H. Acara Perdata
3	HIT1362	Hukum Ketenagakerjaan	2	Pendukung	HTN & HAN
4	HIB0262	Hukum Kontrak Bisnis	2	Pendukung	H. Perdata & Perikatan
5	HIT0662	Hukum Asuransi	2	Pendukung	H. Perdata & H. Dagang
6	HUT1062	Hukum Lingkungan	2	Pendukung	HAN, PDT & Pidana
7		Mata Kuliah Kekhususan	6	Pendukung	lulus 40 sks
Jumlah SKS			18		

Mata Kuliah Semester VIII (PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI DALAM PT)					
Kurikulum Kampus Merdeka Belajar					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HUB1484	Penulisan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Jurnal	4	Utama	MPH
Jumlah SKS			4		
TOTAL KESELURUHAN SKS			144		
Sebaran Mata Kuliah Pilihan					
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil					
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	HSN1232	Politik Hukum	2	Konsentrasi	Lulus 40 SKS
2	HTN0432	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	Konsentrasi	
3	HTN0252	Kelembagaan Negara	2	Konsentrasi	
4	HTN0752	Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Khusus	2	Konsentrasi	
5	HBN0852	Hukum Kepegawaian	2	Konsentrasi	
6	HSR1232	Hukum Keluarga dan Waris	2	Konsentrasi	
7	HBR0832	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Konsentrasi	
8	HTR0252	Hukum Pasar Modal	2	Konsentrasi	
9	HYR1152	Hukum Lembaga Pembiayaan	2	Konsentrasi	
10	HBR0752	Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	Konsentrasi	
11	HYD0832	Hukum Penitensier	2	Konsentrasi	
12	HSD1132	Politik Hukum Pidana	2	Konsentrasi	
13	HTD0352	Hukum Pidana Pers	2	Konsentrasi	
14	HTD0252	Sistem Peradilan Pidana	2	Konsentrasi	
15	HBD0652	Hukum Pembuktian Pidana	2	Konsentrasi	
16	HTI0452	Sistem Perundang-Undangan Islam	2	Konsentrasi	
17	HTI0632	Sejarah Hukum Islam	2	Konsentrasi	
18	HIT0152	Filsafat Hukum Islam	2	Konsentrasi	
19	HBI0852	Hukum Asuransi Syariah	2	Konsentrasi	
20	HBI0932	Hukum Perbankan Syariah	2	Konsentrasi	
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap					
1	HBN0942	Hukum Perizinan	2	Konsentrasi	Lulus 40 SKS
2	HTN0142	Pemerintah Aceh	2	Konsentrasi	
3	HTN0342	Hukum Konstitusi	2	Konsentrasi	
4	HYN1062	Hukum Tata Ruang	2	Konsentrasi	
5	HYN1162	Hukum Keimigrasian	2	Konsentrasi	
6	HTN0562	Hukum Perjanjian Internasional	2	Konsentrasi	
7	HTN0662	Hukum Keuangan Negara	2	Konsentrasi	
8	HTR0342	Hukum Kepailitan	2	Konsentrasi	
9	HTR0142	Perbandingan Hukum Perdata	2	Konsentrasi	
10	HBR0942	Perbuatan Melawan Hukum	2	Konsentrasi	
11	HTR0562	Hukum Penanaman Modal	2	Konsentrasi	
12	HBR0662	Hukum Perusahaan	2	Konsentrasi	
13	HTR0462	Hukum Jaminan	2	Konsentrasi	
14	HYR1062	Hukum Persaingan Usaha	2	Konsentrasi	
15	HTD0142	Perbandingan Hukum Pidana	2	Konsentrasi	
16	HYD0962	Kriminologi	2	Konsentrasi	
17	HTD0442	Kapita Selektta Hukum Pidana	2	Konsentrasi	
18	HYD0762	Victimologi	2	Konsentrasi	
19	HSD1062	Pengadilan HAM	2	Konsentrasi	
20	HSD1262	Hukum Pidana Internasional	2	Konsentrasi	
21	HTD0562	Eksaminasi Putusan Pidana	2	Konsentrasi	
22	HTI0342	Hukum Pemerintah Islam	2	Konsentrasi	
23	HYI1142	Hukum Bisnis Islam	2	Konsentrasi	
24	HTI0542	HAM Dalam Islam	2	Konsentrasi	
25	HTI0262	Hukum Internasional Islam	2	Konsentrasi	
26	HBI0762	Hukum Perikatan Islam	2	Konsentrasi	
27	HYI1062	Hukum Gadai Syariah	2	Konsentrasi	
28	HIS0162	Hukum Zakat dan Wakaf	2	Konsentrasi	

E. Deskripsi Mata Kuliah

1. Hukum Islam (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat, menjadi prasyarat bagi mata kuliah yang lain.

Deskripsi : Mata kuliah hukum Islam yang berdurasi 2 sks umumnya memberikan gambaran singkat tentang prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Mata kuliah ini mungkin mencakup pemahaman dasar tentang hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, dan aplikasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat diajak untuk memahami konsep-konsep dasar seperti syariah, fiqh, hukum keluarga Islam, dan aspek-aspek hukum lainnya. Selain itu, mata kuliah ini mungkin juga membahas perkembangan dan implementasi hukum Islam dalam berbagai konteks sejarah dan geografis. Mahasiswa dapat diperkenalkan kepada hukum Islam sebagai sistem hukum yang mencakup aspek agama dan kehidupan sosial.

2. Pendidikan Agama (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat, menjadi prasyarat bagi mata kuliah yang lain.

Deskripsi : Mata kuliah ini mempelajari tentang keberadaan manusia dan agama, sumber agama dan ajaran Islam kerangka dasar agama Islam, Aqidah, Syariah/syaria't, Taqwa, Islam, dan Ilmu Pengetahuan, Jihad dalam Islam, dan hubungannya dengan non-muslim.

3. Pengantar Ilmu Hukum (3 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat, menjadi prasyarat bagi mata kuliah yang lain.

Deskripsi : Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum merupakan kursus yang memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep hukum dan sistem hukum. Mata kuliah ini biasanya mencakup berbagai topik, seperti sumber-sumber hukum, struktur hukum, asas-asas hukum, dan peran lembaga-lembaga hukum. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pengantar bagi mahasiswa terhadap dunia hukum, sehingga mereka dapat memahami dasar-dasar hukum yang mendasari sistem hukum di suatu negara. Selain itu, mata kuliah ini juga seringkali membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami konteks hukum yang

lebih luas dan menjadi dasar bagi pemahaman mereka terhadap mata kuliah hukum lanjutan. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum umumnya memiliki bobot sks (sistem kredit semester) yang relatif ringan, sekitar 3 sks, karena fokus utamanya adalah memberikan gambaran umum dan dasar-dasar hukum kepada mahasiswa.

4. Pengantar Hukum Indonesia (4 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat, menjadi prasyarat bagi mata kuliah yang lain.

Deskripsi : Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan suatu kursus yang memberikan pemahaman dasar mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam kursus ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, struktur hukum, dan sistem hukum nasional. Mata kuliah ini mencakup pokok-pokok hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaruh-pengaruh budaya dan sistem hukum yang ada sebelumnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan landasan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar hukum Indonesia kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat memahami peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Secara umum, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia berfokus pada memberikan pengetahuan dasar mengenai struktur hukum, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mahasiswa dapat memahami dasar hukum yang menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan peraturan di tingkat nasional.

5. Bahasa Indonesia (1 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah singkat yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks hukum. Mata kuliah ini umumnya memiliki bobot satu satuan kredit semester (1 SKS) dan fokus pada pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia yang relevan dengan bidang hukum. Mahasiswa akan mempelajari istilah-istilah hukum dalam bahasa Indonesia, teknik penulisan dokumen

hukum, dan komunikasi efektif dalam ranah hukum. Selain itu, mata kuliah ini mungkin juga memberikan pemahaman tentang norma-norma linguistik yang berlaku dalam bahasa hukum Indonesia. Meskipun ringkas, mata kuliah ini memberikan dasar yang penting bagi mahasiswa untuk berkomunikasi secara jelas dan tepat dalam konteks hukum menggunakan bahasa Indonesia.

6. Bahasa Inggris Hukum (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah dasar umum yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL yang dirancang dengan memperhatikan aspek gramatika serta muatan pembelajaran yang diarahkan pada English for Specific Purposes-Law. Dalam proses pembelajaran, materi tata bahasa ataupun grammar diberikan pada lima pertemuan pertama yang bertujuan untuk mereview serta memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan grammar. Materi dilanjutkan dengan mengangkat topik-topik yang mempunyai korelasi dalam peningkatan pemahaman dan penguasaan mahasiswa dalam mempelajari hukum, untuk lebih lanjut diharapkan dapat menunjang kompetensi lulusan Fakultas Hukum Unimal. Materi-materi yang diangkat dalam pokok bahasan dirancang dengan memperhatikan aspek reading, listening, dan writing, dengan tetap mengindahkan aspek structure penulisan. Maknanya, dalam setiap pokok bahasan yang disampaikan keempat aspek di atas diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditetapkan.

7. Pancasila (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Pancasila dengan bobot 2 sks umumnya memberikan pengantar dan pemahaman dasar tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Mata kuliah ini mencakup konsep-konsep dasar Pancasila, seperti sila-sila (keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketuhanan yang maha esa), sejarah pembentukan

Pancasila, dan relevansinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, mata kuliah ini mungkin juga memberikan pemahaman tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, peran Pancasila dalam pembangunan nasional, serta bagaimana Pancasila menjadi landasan filosofis bagi berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia. Meskipun bobot sks-nya tidak besar, mata kuliah ini memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang identitas dan karakter bangsa Indonesia serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

8. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) biasanya dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Meskipun berdurasi 2 sks (sks), mata kuliah ini dapat mencakup berbagai topik seperti sistem pemerintahan, sejarah bangsa, hukum, kebijakan publik, dan isu-isu sosial yang relevan. Tujuan utamanya adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai mata kuliah yang bersifat fundamental, Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk sikap, nilai, dan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta membentuk landasan etika dalam berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan negara.

9. Kemalikussalehan (1 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah kemalikussalehan membahas tentang sultan malikussaleh dan sejarahnya di Aceh dan Indonesia secara umum. Nama ini kemudian diabadikan sebagai nama universitas malikussaleh (Universitas Malikussaleh).

10. Teknologi Informasi dan Kewirausahaan (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah "Teknologi Informasi dan Kewirausahaan" (2 SKS) adalah program pendidikan tinggi yang menggabungkan dua bidang utama: teknologi informasi dan kewirausahaan. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana teknologi informasi dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam konteks bisnis dan kewirausahaan. Pada umumnya, mata kuliah ini akan membahas konsep-konsep dasar teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan aplikasi bisnis. Selain itu, juga akan diajarkan bagaimana menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola data, dan meningkatkan daya saing bisnis. Di sisi kewirausahaan, mahasiswa akan belajar tentang aspek-aspek dasar bisnis, perencanaan usaha, pengembangan model bisnis, dan strategi pemasaran. Terdapat juga penekanan pada bagaimana teknologi informasi dapat menjadi alat strategis dalam mendukung berbagai tahapan bisnis, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mata kuliah ini umumnya dirancang untuk memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam konteks kewirausahaan, memberikan mahasiswa keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berhasil di lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan terdigitalisasi..

11. Hukum Pidana Islam (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari program studi yang membahas aspek hukum dalam konteks agama Islam. Mata kuliah ini biasanya memiliki bobot kredit 2 SKS (Satuan Kredit Semester) yang menunjukkan tingkat kepadatan materi dan waktu perkuliahan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana Islam, termasuk konsep-konsep dasar, jenis-jenis pidana, serta prosedur peradilan dalam hukum pidana Islam. Materi yang diajarkan mungkin melibatkan pemahaman terhadap hukuman-hukuman dalam Islam, prinsip keadilan, dan hak-hak individu dalam konteks pidana. Selain itu, mahasiswa juga dapat

mempelajari perbandingan antara hukum pidana Islam dengan sistem hukum pidana umum, serta aplikasi hukum pidana Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai hukum pidana Islam, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan bobot kredit yang relatif ringan, mata kuliah ini mungkin memberikan gambaran umum dan dasar-dasar hukum pidana Islam tanpa mencakup semua aspek yang lebih kompleks.

12. Sosiologi Hukum (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah sosiologi hukum merupakan bagian dari studi ilmu hukum yang mendalami keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Dengan durasi 2 SKS (Satuan Kredit Semester), mata kuliah ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana norma-norma hukum dan sistem hukum berinteraksi dengan struktur sosial, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan mempelajari konsep-konsep dasar sosiologi hukum, seperti hubungan antara hukum dan keadilan, peran lembaga hukum dalam masyarakat, serta dampak sosial dari implementasi kebijakan hukum. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan sosiologi hukum, seperti globalisasi, pluralisme hukum, dan perubahan sosial yang memengaruhi sistem hukum. Meskipun durasinya singkat, mata kuliah ini memberikan pemahaman awal yang penting tentang hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat.

13. Hukum Adat (3 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Adat merupakan bagian dari studi hukum yang membahas sistem hukum tradisional suatu masyarakat atau kelompok etnis. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang diakui dan dijalankan oleh suatu komunitas secara turun-temurun. Hukum Adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tradisional, seperti sistem kepemilikan tanah, warisan, pernikahan, dan

penyelesaian sengketa. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Adat akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam hukum adat, struktur hukum adat, serta bagaimana hukum adat berinteraksi dengan sistem hukum nasional atau modern. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga adat, proses pembuatan keputusan, dan cara penegakan hukum dalam konteks budaya dan tradisi tertentu. Mata kuliah ini seringkali memberikan wawasan mendalam tentang keberagaman hukum di Indonesia atau di wilayah-wilayah dengan latar belakang kultural yang kaya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengkaji tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh hukum adat dalam menghadapi modernisasi dan perkembangan zaman.

14. Antropologi Hukum (3 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah antropologi hukum merupakan pengenalan terhadap kajian antropologi yang difokuskan pada aspek hukum dalam masyarakat. Dalam durasi singkat 2 SKS (satu semester kredit), mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep-konsep dasar antropologi hukum dan bagaimana budaya serta norma-norma sosial memengaruhi perkembangan sistem hukum. Materi yang diajarkan dapat mencakup analisis mengenai peran budaya dalam pembentukan norma hukum, hubungan antara kebijakan hukum dan nilai-nilai masyarakat, serta cara pandang etnografi terhadap konflik hukum. Mahasiswa juga mungkin mempelajari studi kasus mengenai interaksi antara hukum formal dan hukum adat dalam berbagai masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas hubungan antara budaya, masyarakat, dan sistem hukum. Meskipun durasinya singkat, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas terkait bagaimana antropologi dapat membantu menganalisis dan memahami dinamika hukum dalam konteks sosial dan budaya.

15. Ilmu Negara (2)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Ilmu Negara (2 SKS) umumnya memberikan pemahaman dasar tentang sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Mata kuliah ini mencakup konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, seperti struktur pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa biasanya akan mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik, perbandingan antara berbagai bentuk pemerintahan, dan pengaruh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap dinamika politik suatu negara. Mata kuliah ini juga dapat membahas topik-topik seperti hak asasi manusia, konstitusi, sistem perwakilan politik, serta isu-isu kontemporer dalam politik. Meskipun berfokus pada materi dasar, mata kuliah ini mungkin memberikan wawasan yang cukup luas tentang struktur dan dinamika politik dalam lingkup nasional atau internasional. Dengan durasi 2 SKS, mata kuliah ini kemungkinan memberikan pemahaman dasar tanpa mencakup detail-detail yang terlalu mendalam. Mahasiswa dapat diharapkan untuk memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep kunci dalam ilmu politik dan dapat menghubungkannya dengan realitas politik di berbagai tingkatan.

16. Hukum Pidana (3 SKS)

Prasyarat : tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah hukum pidana merupakan bagian dari studi hukum yang fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelanggaran pidana dan sistem hukum pidana. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hukum pidana, termasuk prinsip-prinsip dasar, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Diskusi juga melibatkan pemahaman tentang jenis-jenis kejahatan, teori-teori hukum pidana, dan prosedur peradilan pidana. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar mengenai tanggung jawab pidana, yaitu sejauh mana individu dapat dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pembahasan dalam mata kuliah ini mungkin mencakup perbandingan sistem hukum pidana, isu-isu etika dalam penegakan hukum, serta perkembangan dan perubahan

dalam bidang hukum pidana. Mata kuliah hukum pidana umumnya dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem peradilan pidana dan konsep-konsep hukum yang mendasari penegakan norma-norma pidana dalam suatu masyarakat. Meskipun durasi mata kuliah ini terbatas pada 3 SKS (Satuan Kredit Semester), mahasiswa diharapkan dapat memperoleh wawasan yang cukup untuk memahami dasar-dasar hukum pidana.

17. Hukum Perdata (3 SKS)

Prasyarat : tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah hukum perdata adalah salah satu mata kuliah dalam bidang hukum yang membahas aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah pada hak dan kewajiban individu, serta norma-norma yang mengatur perbuatan hukum yang melibatkan pihak-pihak swasta. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum perdata, termasuk konsep subjek hukum, perjanjian, tanggung jawab hukum, kepemilikan, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan hubungan perdata. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat membahas aspek-aspek spesifik seperti hukum keluarga, hukum waris, dan hukum kontrak. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa kemungkinan besar akan diberikan pemahaman mendalam tentang sistem hukum perdata yang berlaku di negara tertentu, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelesaian kasus-kasus nyata. Seiring berjalannya mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan analisis hukum, pemahaman terhadap norma-norma hukum perdata, dan kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks praktis.

18. Hukum Waris Islam dan Adat (3 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum waris dalam dua konteks utama, yaitu Islam dan adat. Pemahaman tentang sistem hukum waris Islam dan adat sangat penting karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman

dalam praktik-praktik hukum warisnya. Dalam konteks Islam, mahasiswa akan mempelajari aturan-aturan waris yang terdapat dalam hukum Islam dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Selain itu, dalam konteks adat, mahasiswa akan memahami norma-norma adat yang mengatur pewarisan di berbagai daerah di Indonesia. Mata kuliah ini juga dapat membahas perbandingan antara hukum waris Islam dan adat, menyoroti persamaan dan perbedaan antara keduanya. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami isu-isu kontemporer terkait hukum waris, seperti perubahan norma-norma hukum waris akibat perkembangan sosial dan ekonomi. Secara umum, tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa mengenai aspek-aspek hukum waris dalam konteks Islam dan adat di Indonesia, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik hukum di masyarakat.

19. Hukum Ekonomi Islam (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Islam

Deskripsi : Mata kuliah "Hukum Ekonomi Islam" adalah suatu program studi yang memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan aspek ekonomi. Mata kuliah ini biasanya dirancang untuk mencakup konsep-konsep dasar dalam ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mahasiswa dalam mata kuliah ini mungkin akan mempelajari hukum-hukum ekonomi Islam yang melibatkan transaksi perdagangan, keuangan, dan investasi. Selain itu, mereka dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan praktik bisnis. Selama perkuliahan, mahasiswa mungkin juga akan mempelajari hukum-hukum yang mengatur zakat, infaq, wakaf, dan aspek-aspek lain dari sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi. Dengan durasi 2 sks (sks atau satuan kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk mengukur beban studi), mata kuliah ini mungkin dirancang

sebagai mata kuliah singkat yang memberikan gambaran umum dan pemahaman dasar tentang hubungan antara hukum dan ekonomi dalam perspektif Islam.

20. Hukum Perkawinan (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah "Hukum Perkawinan" adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang aspek hukum yang terkait dengan pernikahan. Dalam lingkup dua sks, mahasiswa akan diajarkan tentang dasar-dasar hukum perkawinan, termasuk aturan-aturan yang mengatur proses pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta hak-hak anak dalam konteks keluarga. Materi perkuliahan dapat mencakup berbagai topik seperti syarat sah dan batasan perkawinan, prosedur pernikahan, hak-hak hukum suami istri, pembagian harta bersama, perceraian, dan hak-hak anak setelah perceraian. Mahasiswa juga mungkin mempelajari perkembangan terkini dalam hukum perkawinan serta dampak perubahan sosial dan budaya terhadap institusi pernikahan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum yang mengatur kehidupan berkeluarga, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks praktis. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman kritis terhadap isu-isu etis dan sosial yang terkait dengan hukum perkawinan.

21. Hukum Tata Negara (3 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Tata Negara adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar mengenai struktur dan fungsi negara serta sistem hukum yang mengaturnya. Dalam lingkup dua sks, mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar hukum tata negara, seperti kedaulatan negara, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, dan hak asasi manusia. Materi kuliah ini mencakup studi mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dengan warganegara. Mahasiswa juga dapat mempelajari prinsip-prinsip demokrasi, kebijakan publik, dan isu-isu aktual yang berkaitan dengan tata negara. Meskipun

bersifat singkat dengan alokasi sks yang terbatas, mata kuliah ini bertujuan memberikan landasan pemahaman yang kuat tentang sistem hukum tata negara sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks hukum dan kehidupan sehari-hari.

22. Hukum Acara Pidana (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Pidana

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Acara Pidana adalah bagian dari studi hukum yang memfokuskan pada prosedur peradilan dalam kasus pidana. Dalam dua sks (satu semester), mahasiswa akan diajarkan mengenai aturan-aturan yang mengatur jalannya persidangan dalam sistem peradilan pidana. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek, seperti tata cara penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pidana. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar tentang hak-hak tersangka, pembelaan, serta peran berbagai pihak dalam proses peradilan pidana. Keseluruhan, Hukum Acara Pidana bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses peradilan pidana dan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam menegakkan keadilan dalam konteks tindak pidana.

23. Hukum Acara Perdata (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Perdata

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Acara Perdata adalah bagian dari studi hukum yang membahas aturan-aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penyelesaian perkara di ranah perdata. Mata kuliah ini umumnya mencakup aspek-aspek seperti tata cara pengajuan gugatan, proses persidangan, bukti-bukti dalam persidangan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini biasanya akan mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata, termasuk aturan-aturan formal yang mengatur jalannya proses peradilan, serta keterkaitannya dengan materi hukum perdata. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik perdata antara pihak-pihak yang bersengketa. Mata kuliah Hukum Acara Perdata umumnya memiliki bobot sks (sistem kredit

semester) yang lebih ringan, seperti 2 sks, sehingga fokus pada pokok-pokok materi yang penting. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa mengenai tata cara dan prosedur di pengadilan perdata sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kasus-kasus nyata.

24. Hukum Administrasi Negara (3 SKS)

Prasyarat : tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berdurasi 2 SKS (Satuan Kredit Semester) umumnya memberikan gambaran singkat tentang prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara. Fokus utama dari mata kuliah ini mungkin mencakup pemahaman mengenai struktur dan fungsi pemerintahan, proses pembuatan kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Dalam dua SKS, mahasiswa mungkin akan mempelajari konsep-konsep dasar hukum administrasi negara, termasuk hak dan kewajiban administrasi negara, prosedur administratif, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan pemerintah. Diskusi juga dapat melibatkan studi kasus untuk memberikan contoh konkret dari penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks nyata. Selain itu, mata kuliah ini dapat membahas perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia atau di negara-negara lain, serta isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan administrasi negara. Mahasiswa mungkin diharapkan untuk memahami peran hukum dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap hak dan kepentingan warga negara.

25. Hukum Dagang (3 SKS)

Prasyarat : Hukum Perdata

Deskripsi : Mata kuliah hukum dagang biasanya membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan bisnis. Mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur transaksi komersial, kontrak bisnis, tanggung jawab hukum dalam konteks

perdagangan, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam lingkup bisnis. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan belajar mengenai berbagai instrumen hukum yang relevan dengan kegiatan perdagangan, seperti perjanjian jual beli, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, dan mungkin juga hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum bagi mahasiswa agar dapat memahami dan mengelola aspek hukum dalam konteks dunia bisnis. Mata kuliah hukum dagang seringkali mencakup studi kasus, diskusi, dan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan bisnis, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam situasi dunia nyata.

26. Hukum Pidana Khusus (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Pidana

Deskripsi : Mata kuliah pidana khusus dengan bobot 2 SKS (Satuan Kredit Semester) biasanya dirancang untuk membahas aspek-aspek khusus dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, pidana khusus mengacu pada pembahasan mendalam mengenai topik-topik tertentu dalam hukum pidana, di luar cakupan umum hukum pidana. Mungkin saja mata kuliah ini akan fokus pada suatu jenis kejahatan atau permasalahan tertentu dalam sistem hukum pidana, seperti kejahatan ekonomi, narkoba, korupsi, atau mungkin aspek-aspek spesifik dalam hukum pidana internasional. Kurikulumnya kemungkinan mencakup pemahaman mendalam tentang unsur-unsur kejahatan, sanksi pidana, dan isu-isu kontemporer yang terkait. Dengan durasi 2 SKS, mata kuliah ini mungkin akan memberikan pemahaman khusus tanpa mencakup seluruh spektrum hukum pidana, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keahlian di bidang tertentu sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka.

27. Peradilan Islam (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Peradilan Islam biasanya dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sistem peradilan dalam konteks hukum Islam. Dalam kursus ini, mahasiswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan peradilan, termasuk sumber-sumber hukum Islam, proses peradilan, dan implementasi hukum-hukum Islam dalam sistem peradilan. Materi yang diajarkan mungkin mencakup konsep-konsep hukum Islam seperti fiqh (hukum Islam), qiyas (analogi hukum), ijtihad (penafsiran hukum), dan penggunaan hadits dalam proses peradilan. Selain itu, mahasiswa juga mungkin mempelajari tentang struktur peradilan Islam, yaitu bagaimana lembaga-lembaga peradilan dibentuk dan beroperasi dalam kerangka hukum Islam. Dengan durasi 2 SKS (Satuan Kredit Semester), mata kuliah ini mungkin memberikan pemahaman yang terbatas, tetapi mencakup aspek-aspek penting dari peradilan Islam. Tujuan utama dari mata kuliah ini mungkin adalah memberikan dasar pemahaman kepada mahasiswa tentang sistem peradilan Islam serta memberi mereka kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks praktis.

28. Pendidikan Anti Korupsi (1 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mahasiswa mengenai konsep, dampak, dan cara pencegahan korupsi. Meskipun hanya berdurasi satu semester kredit (1 SKS), mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman mengenai korupsi, menjelaskan implikasi negatifnya dalam berbagai sektor, dan memberikan strategi atau metode untuk memerangi serta mencegah tindakan korupsi. Isi mata kuliah ini mungkin mencakup topik-topik seperti definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi pada masyarakat dan pembangunan, hukum dan etika anti-korupsi, serta peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Selain itu, mata kuliah ini mungkin menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskipun hanya satu sks, mata kuliah ini dapat memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami peran mereka dalam mencegah dan melawan korupsi dalam berbagai konteks kehidupan. Mata kuliah ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memberikan kesadaran etika dan moral serta membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas dalam menghadapi tantangan korupsi di masyarakat.

29. Kejahatan Mayantara (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Deskripsi singkat untuk mata kuliah Kejahatan Mayantara (2 SKS) mungkin mencakup pemahaman tentang jenis kejahatan yang terjadi di dunia maya atau siber. Mata kuliah ini mungkin fokus pada konsep-konsep dasar keamanan siber, risiko keamanan, dan strategi untuk mengatasi ancaman siber. Mahasiswa mungkin mempelajari tentang teknik-teknik kejahatan mayantara, seperti serangan peretasan, phishing, malware, dan upaya-upaya untuk melindungi informasi sensitif dan data pribadi. Mata kuliah ini juga bisa mencakup aspek hukum dan etika terkait dengan kejahatan mayantara serta upaya penegakan hukum dalam menanggapi insiden keamanan siber. Tujuan akhirnya mungkin memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan keamanan siber dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi informasi dan sistem di dunia maya.

30. Hukum Pidana Ekonomi (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Deskripsi : Mata kuliah hukum pidana ekonomi adalah program studi yang membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan kejahatan ekonomi dan keuangan. Dalam lingkup ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana ekonomi seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, insider trading, dan kejahatan-kejahatan keuangan lainnya. Mata kuliah ini mungkin mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum pidana, penegakan hukum, dan peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan ekonomi. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari

studi kasus nyata, perkembangan hukum terkini, dan isu-isu etika yang terkait dengan hukum pidana ekonomi. Dengan durasi 2 sks (satu semester), mata kuliah ini kemungkinan akan memberikan pemahaman dasar tentang hukum pidana ekonomi dan memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam konteks kejahatan ekonomi.

31. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah "Hukum Acara Konstitusi" adalah suatu kajian yang fokus pada prosedur hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara yang melibatkan aspek konstitusi dalam suatu negara. Dalam konteks ini, mahasiswa akan mempelajari tata cara, prosedur, dan aturan yang mengatur proses peradilan yang terkait dengan konstitusi, baik dalam pengujian undang-undang, sengketa pemilihan, atau perkara-perkara konstitusional lainnya. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mungkin mencakup prinsip-prinsip dasar hukum acara konstitusi, yaitu langkah-langkah pengajuan, proses persidangan, dan putusan dalam perkara-perkara yang melibatkan konstitusi. Mahasiswa juga dapat mempelajari aspek-aspek penting seperti yurisdiksi, bukti, dan upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara konstitusi. Mata kuliah ini biasanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang kokoh terkait dengan mekanisme hukum yang terlibat dalam menyelesaikan konflik konstitusional, serta memahamkan mahasiswa terhadap peran dan fungsi lembaga-lembaga hukum yang terlibat dalam proses tersebut, seperti pengadilan konstitusi atau lembaga peradilan tinggi. Meskipun mata kuliah ini memiliki bobot sks yang relatif ringan (2 sks), namun memberikan dasar yang penting bagi pemahaman sistem hukum konstitusi suatu negara.

32. Hukum Acara PTUN (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah ini membahas tentang prosedur hukum yang berlaku dalam pengadilan tata usaha negara. Fokus utama meliputi aturan-aturan hukum yang mengatur tata cara dan prosedur peradilan administratif yang melibatkan

negara atau lembaga-lembaga pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur jalannya proses peradilan tata usaha negara. Topik yang dibahas melibatkan berbagai aspek, seperti gugatan terhadap keputusan administratif, upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan instansi pemerintah, penyelesaian sengketa administratif, dan peran lembaga peradilan tata usaha negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Mata kuliah ini juga dapat mencakup studi kasus dan analisis terhadap perkembangan terkini dalam bidang hukum acara peradilan tata usaha negara, sehingga mahasiswa dapat memahami aplikasi praktis dari konsep-konsep yang dipelajari dalam perkuliahan. Keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap sistem peradilan tata usaha negara dan keterkaitannya dengan fungsi negara dalam konteks administratif.

33. Kapita Selektta Hukum Islam (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Islam

Deskripsi : Mata kuliah Kapita Selektta Hukum Islam merupakan mata kuliah pilihan yang menawarkan pemahaman mendalam tentang topik-topik khusus dalam bidang hukum Islam. Dengan durasi 2 sks (satu semester), mata kuliah ini biasanya dirancang untuk membahas isu-isu hukum Islam yang lebih spesifik dan kompleks. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah ini setelah memiliki dasar pengetahuan hukum Islam. Topik yang dibahas dalam Kapita Selektta Hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perguruan tinggi atau dosen yang mengampu. Contoh topik yang mungkin dibahas meliputi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi Islam, hukum pidana Islam, atau isu-isu kontemporer dalam konteks hukum Islam. Mahasiswa kemungkinan akan diberikan pemahaman mendalam melalui analisis teks-teks hukum Islam, studi kasus, dan pembahasan literatur terkini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap konsep-konsep hukum Islam serta mengajak mahasiswa untuk menghubungkan teori-teori tersebut dengan situasi praktis. Dengan

demikian, **Kapita Selekta Hukum Islam** dapat menjadi landasan yang kuat bagi mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan studi atau berkarier dalam bidang hukum Islam.

34. Hukum HAM dan Humaniter (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa syarat

Deskripsi : Mata kuliah ini akan membahas landasan filosofis dan sejarah perkembangan HAM, termasuk dokumen-dokumen internasional yang mengatur hak asasi manusia. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari prinsip-prinsip hukum humaniter yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata, termasuk norma-norma yang diakui secara internasional. Topik yang mungkin dibahas meliputi hak-hak dasar manusia, tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak tersebut, dan mekanisme penegakan hukum internasional terkait HAM. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami konsep dan prinsip-prinsip hukum humaniter yang terkait dengan perlindungan korban konflik bersenjata, termasuk hak-hak yang harus dihormati dalam situasi konflik. Mata kuliah ini mungkin juga mengintegrasikan studi kasus nyata, debat, atau analisis kritis terhadap isu-isu kontemporer terkait HAM dan hukum humaniter. Dengan alokasi 2 sks, fokus utama mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman dasar yang kokoh namun ringkas tentang kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter di tingkat internasional.

35. Hukum Perikatan (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Perdata

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Perikatan adalah bagian dari studi hukum yang membahas mengenai kewajiban dan hak-hak yang timbul dari perjanjian antara pihak-pihak. Fokus utama mata kuliah ini adalah memahami dasar hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang timbul akibat perjanjian. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum perikatan, syarat-syarat sahnya perjanjian, serta akibat hukum yang timbul apabila suatu perjanjian dilanggar atau tidak dipenuhi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga dapat memahami konsep-konsep seperti objek

perikatan, subjek perikatan, dan cara-cara pemenuhan perikatan. Selain itu, aspek-aspek etika dan keadilan dalam konteks perikatan juga mungkin dibahas. Pemahaman mendalam mengenai hukum perikatan menjadi penting dalam konteks pengaturan hubungan hukum di masyarakat, bisnis, maupun transaksi lainnya. Mata kuliah ini biasanya memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana perjanjian dibentuk, bagaimana melaksanakan kewajiban yang timbul, dan bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam konteks hukum perikatan. Meskipun memiliki bobot sks yang relatif rendah (2 sks), hukum perikatan memegang peranan penting dalam membentuk dasar pengetahuan hukum bagi mahasiswa.

36. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa Syarat

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari bidang hukum yang fokus pada perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual manusia. Mata kuliah ini membahas hak-hak yang terkait dengan kreativitas dan inovasi, seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri. Peserta kuliah akan memahami prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual, serta dampaknya terhadap pemilik hak dan masyarakat umum. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat mencakup isu-isu terkini dalam bidang HKI, termasuk tantangan global, perkembangan teknologi, dan aspek hukum yang terkait dengan era digital. Dengan durasi 2 SKS (Satuan Kredit Semester), mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tanpa mendalam tentang hukum HKI kepada mahasiswa.

37. Hukum Internasional (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa Syarat

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Internasional (2 SKS) memberikan pengantar singkat kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur hubungan antar negara. Mata kuliah ini mencakup pemahaman terhadap norma-norma hukum internasional, struktur hukum internasional, dan peran lembaga-lembaga internasional. Mahasiswa juga dapat mempelajari prinsip-

prinsip utama seperti kedaulatan negara, penyelesaian sengketa internasional, hak asasi manusia, serta kewajiban dan tanggung jawab negara-negara di dunia internasional. Dengan durasi dua semester kredit (SKS), mata kuliah ini mungkin memberikan gambaran yang terbatas tetapi esensial tentang sistem hukum internasional, memberikan dasar bagi pemahaman mahasiswa tentang bagaimana norma-norma ini memengaruhi hubungan antar negara. Mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman yang dibutuhkan dalam konteks hukum global.

38. Filsafat Hukum (2 SKS)

Prasyarat : PIH dan PHI

Deskripsi : Mata kuliah Filsafat Hukum (2 sks) merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi hukum yang memberikan pengantar konsep dan teori-teori filsafat yang mendasari hukum. Dengan durasi 2 sks, fokus utama mata kuliah ini mungkin pada pokok-pokok pikiran dasar filsafat hukum dan aplikasinya dalam konteks hukum. Mahasiswa mungkin akan diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh filsafat hukum terkemuka dan bagaimana pandangan-pandangan tersebut memengaruhi pengembangan sistem hukum. Materi yang diajarkan dapat mencakup konsep-konsep seperti keadilan, hak asasi manusia, etika hukum, dan mungkin juga pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang lebih mendalam. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari bagaimana filsafat hukum berinteraksi dengan praktik hukum sehari-hari dan bagaimana pandangan filsafat dapat membentuk perubahan atau evolusi dalam sistem hukum. Meskipun hanya 2 sks, mata kuliah ini mungkin memberikan landasan yang penting bagi mahasiswa untuk memahami dasar-dasar pemikiran hukum secara filosofis dan membekali mereka dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek intelektual hukum.

39. PKH Acara Perdata dan Peradilan Adat (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Acara Perdata dan Hukum Adat

Deskripsi : Mata kuliah "Praktik Kemahiran Hukum Acara Perdata dan Peradilan Adat" adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menghadapi situasi hukum di ranah perdata dan peradilan adat. Dengan alokasi 2 SKS (Satuan Kredit Semester), mata kuliah ini fokus pada penerapan hukum acara perdata dan adat dalam konteks praktis. Materi yang diajarkan mungkin melibatkan pembahasan prosedur hukum acara perdata, termasuk tahapan persidangan, dokumen-dokumen hukum yang relevan, dan keterampilan berbicara di depan pengadilan. Selain itu, juga dapat mencakup pengenalan terhadap prinsip-prinsip peradilan adat, termasuk prosedur dan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum adat. Mata kuliah ini kemungkinan besar menekankan aspek praktis, seperti simulasi persidangan, penulisan dokumen hukum, dan keterampilan komunikasi hukum. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan hukum dalam konteks nyata dan memahami bagaimana proses hukum berlangsung dalam peradilan perdata dan adat. Selain itu, mata kuliah ini mungkin juga memberikan wawasan mengenai isu-isu kontemporer dalam hukum acara perdata dan peradilan adat, sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan hukum terkini yang relevan dengan bidang ini.

40. PKH Acara Pidana dan Acara Jinayah (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Acara Pidana

Deskripsi : Mata kuliah "Praktik Kemahiran Hukum Acara Pidana dan Jinayah" (2 SKS) secara umum merupakan bagian dari program studi hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis terkait pelaksanaan hukum acara pidana dan jinayah. Mata kuliah ini fokus pada aplikasi konsep-konsep hukum acara pidana dan jinayah dalam konteks praktik hukum. Peserta kuliah diharapkan dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam menghadapi proses hukum di bidang pidana, termasuk penggunaan teknik dan strategi dalam berbagai tahap peradilan pidana. Topik yang mungkin dicakup meliputi penyusunan berbagai dokumen hukum, keterampilan

berbicara di pengadilan, taktik peradilan, penelitian hukum, dan pemahaman tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan proses hukum acara pidana dan jinayah. Mata kuliah ini biasanya mencakup studi kasus, peran bermain, simulasi persidangan, dan diskusi kelompok untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan teoritis mereka tentang hukum acara pidana dan jinayah ke dalam keterampilan praktis yang diperlukan dalam konteks profesional di lapangan hukum.

41. PKH Acara Tata Usaha Negara (2 SKS)

Prasyarat : Tanpa Syarat

Deskripsi : Mata kuliah "Praktik Kemahiran Hukum Acara Tata Usaha Negara" (PKHATUN) adalah mata kuliah yang bertujuan mengajarkan mahasiswa tentang praktik hukum acara di bidang tata usaha negara. Dalam konteks ini, tata usaha negara mencakup prosedur hukum yang berkaitan dengan aktivitas administrasi pemerintahan dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Mata kuliah ini biasanya membahas berbagai aspek, termasuk tata cara pengajuan gugatan administratif, prinsip-prinsip hukum acara tata usaha negara, upaya hukum yang dapat diambil terkait dengan keputusan administratif, dan pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam konteks pemerintahan. Mahasiswa biasanya akan belajar mengenai mekanisme penyelesaian sengketa administratif, termasuk proses peradilan administratif dan peninjauan kembali keputusan administratif. Selain itu, mereka mungkin juga mempelajari keterkaitan antara hukum acara tata usaha negara dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. Mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara hukum dalam interaksi antara individu atau organisasi dengan lembaga pemerintahan, membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menangani kasus-kasus hukum yang terkait dengan tata usaha negara. Dengan durasi 2 sks, mata kuliah ini mungkin memberikan pendekatan ringkas namun komprehensif terhadap topik tersebut.

42. Praktik Perancangan Kontrak (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Perikatan

Deskripsi : Mata kuliah Praktik Perancangan Kontrak (2 SKS) merupakan bagian dari program studi yang fokus pada pembelajaran praktis dalam merancang kontrak. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek perancangan kontrak, termasuk prinsip-prinsip hukum yang terlibat. Selama kursus ini, mahasiswa dapat belajar tentang langkah-langkah praktis dalam merumuskan kontrak, menilai risiko hukum yang mungkin timbul, dan memahami aspek perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kontennya mungkin mencakup studi kasus, simulasi, atau proyek-proyek praktis yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan teoritis mereka dalam konteks dunia nyata. Dalam beberapa kasus, mata kuliah ini juga dapat membahas kontrak-kontrak khusus di berbagai industri atau sektor, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keahlian yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks bisnis. Mata kuliah ini mungkin melibatkan pemahaman tentang terminologi hukum, etika bisnis, dan keterampilan komunikasi yang baik, karena merancang kontrak melibatkan negosiasi dan penyusunan dokumen hukum yang jelas dan sah. Keseluruhan, mata kuliah ini diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam lingkungan profesional di mana perancangan kontrak diperlukan.

43. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu kursus yang membahas proses dan metode dalam merancang peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini mencakup penjelasan tentang prinsip-prinsip hukum, teknik penyusunan naskah, serta aspek-aspek praktis dalam perancangan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Mahasiswa akan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam merancang peraturan, termasuk analisis kebutuhan, konsultasi publik, serta evaluasi dampak hukum dan sosial. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat membahas aspek etika dan profesionalisme dalam perancangan peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

44. PKH Acara Mahkamah Konstitusi (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Deskripsi : Materi yang diajarkan mencakup berbagai aspek praktik hukum acara, terutama yang terkait dengan tata cara dan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Peserta kuliah dapat belajar tentang penyusunan berkas hukum, penelitian hukum, persiapan sidang, teknik berbicara di persidangan, dan keterampilan praktis lainnya yang diperlukan dalam praktek hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan juga diajarkan cara memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum acara Mahkamah Konstitusi, termasuk aturan mengenai gugatan, pembuktian, dan putusan. Selain itu, peserta kuliah mungkin juga diberikan kesempatan untuk mengenal secara lebih mendalam praktek hukum konstitusi dalam konteks negara tertentu. Secara umum, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus yang mungkin diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat membantu mahasiswa memahami secara mendalam bagaimana sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi beroperasi dan memberikan dasar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam praktik hukum konstitusi di masa depan.

45. Metode Penelitian Hukum (4 SKS)

Prasyarat : 80 SKS

Deskripsi : Mata kuliah Metode Penelitian Hukum adalah suatu kursus yang membahas pendekatan sistematis dan metodologis dalam melakukan penelitian di bidang hukum. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai teknik-teknik penelitian hukum, seperti analisis dokumen hukum, penelitian lapangan, studi kasus, dan metode-metode lainnya yang relevan. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat

mencakup landasan filosofis dan etika penelitian hukum. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk merancang dan melaksanakan penelitian hukum yang berkualitas, serta memahami konsep-konsep dasar yang mendukung metode penelitian hukum. Mata kuliah ini biasanya diberikan dalam format kuliah, diskusi, dan tugas-tugas penelitian.

46. Hukum Perbankan (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Dagang

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Perbankan biasanya merupakan bagian dari program studi hukum atau bidang terkait di perguruan tinggi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan perbankan. Dalam dua sks (satu semester), mahasiswa biasanya akan diajarkan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan lembaga perbankan. Materi yang mungkin diajarkan melibatkan konsep dasar hukum perbankan, peraturan perbankan, perjanjian perbankan, tanggung jawab hukum bank, perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan, penyelesaian sengketa perbankan, dan isu-isu hukum terkini dalam industri perbankan. Mata kuliah ini juga dapat membahas peran lembaga pengawas perbankan, peraturan mengenai praktek perbankan yang adil dan transparan, serta implikasi hukum terhadap inovasi di sektor keuangan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana hukum memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara bank, nasabah, dan pihak terkait lainnya dalam konteks aktivitas perbankan.

47. Hukum Laut Internasional (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Internasional

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Laut Internasional (2 SKS) memberikan pemahaman dasar mengenai norma-norma hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara internasional. Mata kuliah ini mencakup pokok-pokok hukum laut, termasuk konsep-konsep seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), batas maritim, dan hak-hak negara-negara pesisir terhadap sumber daya laut. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari isu-isu aktual

dalam hukum laut, seperti penyelesaian sengketa laut internasional dan perlindungan lingkungan laut. Mata kuliah ini dapat memberikan landasan bagi pemahaman mahasiswa terhadap dinamika hubungan antar-negara dalam konteks pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan.

48. Hukum Perdata Internasional (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Perdata

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Perdata Internasional merupakan bagian dari studi hukum yang memfokuskan pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan perdata antarnegara. Dalam kursus ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional, termasuk konsep hukum, sumber hukum, dan prosedur penyelesaian sengketa internasional dalam konteks perdata. Materi yang diajarkan mungkin melibatkan topik-topik seperti perbedaan sistem hukum nasional, kontrak internasional, tanggung jawab perdata negara, hak kepemilikan, dan pengakuan serta pelaksanaan keputusan peradilan asing. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari perkembangan terkini dalam hukum perdata internasional serta isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan transaksi dan konflik perdata lintas batas. Mata kuliah ini biasanya mencakup kajian kasus-kasus hukum aktual, analisis doktrin hukum, serta mendiskusikan implikasi praktis dan teoritis dari norma-norma hukum perdata internasional. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam konteks hubungan hukum antarnegara.

49. Hukum Ketenagakerjaan (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan bagian dari studi hukum yang fokus pada regulasi dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha di lingkungan kerja. Dalam kursus ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum ketenagakerjaan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, prosedur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, dan isu-isu

kontemporer dalam dunia ketenagakerjaan. Meskipun bersifat singkat (2 sks), mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar yang penting mengenai hukum ketenagakerjaan yang dapat diterapkan dalam konteks praktis di dunia kerja.

50. Hukum Kontrak Bisnis (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Perikatan

Deskripsi : Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak dalam lingkungan bisnis. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip kontrak, jenis-jenis kontrak yang umum dalam transaksi bisnis, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak. Selain itu, kelas ini juga dapat membahas topik-topik khusus seperti kontrak internasional, penyelesaian sengketa, dan implikasi hukum terkait teknologi dan bisnis digital. Mata kuliah ini mungkin melibatkan studi kasus, analisis kontrak aktual, dan pemahaman terhadap perkembangan hukum terkini yang mempengaruhi kontrak bisnis. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan untuk merancang, menganalisis, dan mengevaluasi kontrak bisnis dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Keseluruhan, tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi mahasiswa dalam menghadapi situasi kontrak dalam konteks dunia bisnis.

51. Hukum Asuransi (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Dagang

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Asuransi adalah sebuah kursus yang membahas aspek hukum yang terkait dengan industri asuransi. Mata kuliah ini umumnya mencakup konsep-konsep dasar dalam hukum asuransi, peraturan perundang-undangan yang mengatur industri asuransi, dan hubungan antara pemegang polis, perusahaan asuransi, dan pihak ketiga. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan klaim asuransi, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab hukum dalam konteks asuransi. Topik yang mungkin dibahas meliputi jenis-jenis polis asuransi,

proses klaim, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta isu-isu hukum terkini dalam industri asuransi. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami peran lembaga pengawas dan regulasi dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri asuransi. Mata kuliah Hukum Asuransi seringkali memberikan wawasan yang diperlukan bagi para profesional di bidang hukum, keuangan, dan manajemen risiko untuk memahami dasar-dasar hukum yang mengatur aspek-aspek asuransi dalam kegiatan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dengan durasi 2 sks (sks), mata kuliah ini mungkin dirancang sebagai pendekatan singkat namun informatif untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hukum asuransi.

52. Hukum Lingkungan (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Lingkungan (2 SKS) umumnya memberikan pemahaman dasar tentang konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Dalam dua sks ini, mahasiswa dapat mengharapkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan, peraturan-peraturan yang mengatur isu-isu lingkungan, serta peran lembaga dan mekanisme penegakan hukum dalam konteks perlindungan lingkungan. Topik-topik yang mungkin dicakup melibatkan hukum-hukum perlindungan lingkungan, tanggung jawab hukum terkait dampak lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perlindungan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga dapat diajak untuk memahami perkembangan hukum lingkungan di tingkat nasional maupun internasional. Mata kuliah ini mungkin memberikan wawasan mengenai cara hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merugikan lingkungan, serta dampak dari pelanggaran hukum lingkungan terhadap individu, masyarakat, dan ekosistem secara umum. Meskipun durasinya singkat (2 SKS), mata kuliah ini diharapkan memberikan landasan pengetahuan yang cukup untuk memahami aspek-aspek dasar dalam hukum lingkungan.

53. Praktik Perlindungan Perempuan dan Anak (2 SKS)

Prasyarat : Hukum HAM

Deskripsi : Mata kuliah ini kemungkinan membahas strategi dan metode perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, atau ancaman lainnya. Fokusnya mungkin mencakup pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, undang-undang yang melindungi mereka, serta praktik terbaik dalam memberikan dukungan dan perlindungan. Mungkin ada elemen praktik dalam mata kuliah ini, yang bisa melibatkan studi kasus, simulasi, atau pelatihan keterampilan konkret yang relevan dengan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, mata kuliah ini mungkin juga membahas isu-isu sosial dan budaya yang berperan dalam masalah perlindungan perempuan dan anak.

54. Hukum Agraria (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Agraria adalah mata kuliah yang membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan pertanahan dan kebijakan agraria. Dalam dua sks (sks), mahasiswa akan diperkenalkan pada dasar-dasar hukum agraria, termasuk konsep kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah, dan peraturan-peraturan yang mengatur pemanfaatan serta pengelolaan lahan pertanian. Mata kuliah ini juga dapat mencakup isu-isu kontemporer dalam hukum agraria, seperti reforma agraria, konflik tanah, dan perlindungan hak-hak petani. Selain itu, mahasiswa mungkin akan mempelajari peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengatur pertanahan serta perubahan-perubahan dalam kebijakan agraria. Keseluruhan, mata kuliah Hukum Agraria bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kerangka hukum yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok dengan tanah, dengan fokus pada konteks agraria.

55. Hukum Pajak (2 SKS)

Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Pajak yang berdurasi 2 sks umumnya memberikan pemahaman dasar tentang sistem perpajakan dalam suatu negara. Materi yang diajarkan mencakup prinsip-prinsip dasar hukum pajak, struktur perpajakan,

dan kewajiban perpajakan bagi individu maupun perusahaan. Mahasiswa biasanya akan mempelajari konsep dasar perhitungan pajak, klasifikasi objek pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, mata kuliah ini mungkin juga membahas isu-isu aktual dalam hukum pajak, perubahan kebijakan perpajakan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan bisnis. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman yang kokoh tentang kerangka hukum yang mengatur perpajakan dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik. Meskipun mata kuliah ini bersifat singkat dengan 2 sks, namun dapat memberikan landasan yang penting bagi mahasiswa untuk memahami aspek-aspek dasar hukum pajak yang dapat mereka terapkan dalam konteks profesional dan kehidupan sehari-hari.

56. Etika Profesi Hukum (2 SKS)

Prasyarat : Hukum HAM

Deskripsi : Mata kuliah Etika Profesi umumnya bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam konteks profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Mata kuliah ini biasanya mencakup pembahasan mengenai kode etik, norma-norma moral, dan nilai-nilai yang relevan dengan praktik profesi tersebut. Selain itu, Etika Profesi juga dapat membahas kasus-kasus nyata atau skenario simulasi untuk membantu mahasiswa memahami penerapan prinsip etika dalam situasi praktis. Mata kuliah ini seringkali memberikan landasan bagi mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi dan menanggapi dilema etika yang mungkin dihadapi dalam karir profesional mereka. Selama perkuliahan, mahasiswa juga dapat diajak untuk membahas isu-isu kontemporer dan perubahan dalam praktik profesi yang dapat memengaruhi pertimbangan etika. Secara keseluruhan, Etika Profesi bertujuan untuk membentuk sikap profesional yang etis, bertanggung jawab, dan memahami konsekuensi moral dari tindakan yang diambil dalam konteks pekerjaan atau profesi tertentu.

57. Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Prasyarat : Lulus 111 SKS

Deskripsi : Mata kuliah ini membahas tentang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya di lapangan KKN mempunyai ciri-ciri “interdisipliner, cross sectoral, and comprehensive”. Sebagai salah satu mata kuliah wajib universitas, KKN wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa/i Unimal, sebagai wujud pengabdian perguruan tinggi. KKN dilandasi oleh kenyataan, bahwa setiap masalah dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya (complicated), sehingga pemecahan dengan pendekatan monodisiplin sudah tidak memadai. KKN dimaksudkan sebagai pengisi kekurangan ini, yakni dengan cara berfikir interdisipliner, terpadu dan komprehensif, berdimensi luas, dan praktis.

58. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Penulisan tugas akhir mahasiswa merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Hasil penulisan tugas akhir mahasiswa akan diuji oleh Komisi Penguji. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penulisan tugas akhir akan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.



universitas
MALIKUSSALEH



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

BAB III

PANDUAN PROGRAM MBKM

A. Latar Belakang

Buku saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020, merupakan rujukan dari program MBKM yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Berdasarkan buku panduan tersebut MBKM merupakan kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu MBKM juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda atau melalui kegiatan magang pada instansi pemerintah atau swasta.

Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut, panduan ini merupakan dokumen resmi program studi Hukum yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak 2 semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

B. Dasar Hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merupakan perwujudan dari implimentasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun landasan penerapan kebijakan tersebut di Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 895/UN45/KPT/2020 tentang pemberlakuan Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh.
Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 896/UN45/KPT/2020 tentang pemberlakuan Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh.

C. Tujuan

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti berikut:

1. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan cita-citanya.
3. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
4. Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya, dan peradaban bangsa secara langsung.
5. Dengan kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan nonteknis (soft skills) maupun teknis (hard skills), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul

dan berkepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Secara spesifik Tujuan penyusunan buku panduan MBKM ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan MBKM di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

D. Hasil Yang Diharapkan

Program ini, sesuai dengan misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT, kemandirian, kearifan lokal serta persaingan global;
- b. Terjalannya dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lokal, nasional, maupun internasional sebagai mitra di bidang pendidikan dan kewirausahaan yang saling menguntungkan

E. Ruang Lingkup

Panduan ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yakni:

- (1) desain implementasi Kurikulum MBKM,
- (2) mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Unimal,
- (3) mekanisme kuliah melalui magang, dan
- (4) tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.



universitas
MALIKUSSALEH



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

A. Ketentuan Umum MBKM

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Ketentuan Universitas Malikussaleh

Pelaksanaan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar di Universitas Malikussaleh dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, pada semester VI, mahasiswa diberikan hak untuk belajar pada program studi lain yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh. *Kedua*, pada semester V dan VII atau setara dengan 40 SKS, mahasiswa diberikan hak untuk belajar diluar Universitas Malikussaleh baik pada prodi yang sama maupun tidak, atau dilaksanakan melalui kegiatan magang. *Ketiga*, apabila mahasiswa tidak menghendaki perkuliahan atau kegiatan sebagaimana yang tertera pada poin pertama dan kedua, mahasiswa dapat melakukan perkuliahan seluruhnya pada prodi asal di Universitas Malikussaleh.

Adapun persyaratan mahasiswa Universitas Malikussaleh untuk dapat mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, adalah sebagai berikut;

1. Mahasiswa berasal dari salah satu prodi yang ada di Universitas Malikussaleh;

2. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif dan terdaftar pada PDDikti
3. Mata kuliah atau program kegiatan yang diikuti telah disepakati bersama antara Universitas Malikussaleh dengan mitra Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

C. Ketentuan Fakultas Hukum

Desain implementasi MBKM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya.

Adapun implimentasi dari MBKM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh direalisasikan melalui mekanisme berikut: *Pertama*, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

Kedua, Mahasiswa diberi fasilitas paling lama 2 (dua) semester yaitu pada semester V dan VII untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Universitas Malikussaleh dan atau melaksanakan kegiatan magang pada instansi pemerintah dan non pemerintah, baik yang telah menjadi mitra maupun belum menjadi mitra.

Ketiga, Mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di program studi apapun yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di Universitas Malikussaleh ini selama satu semester atau setara dengan 20 SKS yaitu pada semester VI. Mengenai mata kuliah yang dapat diambil pada program studi di lingkungan Universitas Malikussaleh ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

D. Para Pihak Pelaksana MBKM

1. Fakultas Hukum
 - i. Fakultas Hukum telah memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi dan atau lintas Universitas; (terlampir)
 - ii. Fakultas Hukum telah melakukan kerja sama dan menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan;
2. Program Studi
 - i. Telah menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - ii. Memfasilitasi mahasiswa dari prodi hukum unimal atau prodi lain di niversitas Malikussaleh untuk mengambil mata kuliah lintas prodi;
 - iii. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi atau luar Universitas;
3. Mahasiswa
 - i. Merencanakan bersama dosen Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah atau kegiatan yang akan diluar program studi;
 - ii. Mendaftarkan diri dalam program kegiatan luar prodi yang dipilih
 - iii. Memenuhi segala prasyarat yang ditetapkan mengenai pembelajar di luar prodi, di luar universitas, atau kegiatan lain;
 - iv. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan akademik yang ada;
4. Mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
 - i. Membuat dokumen kerja sama bersama perguruan tinggi atau fakultas atau program studi;
 - ii. Melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan dokumen kerja sama.



universitas
MALIKUSSALEH



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

BAB V

PROGRAM KEGIATAN

Secara umum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dijabarkan dalam 10 Program yaitu: kuliah di program studi di luar Universitas Asal, Kuliah pada program studi yang berbeda di Lingkungan Universitas Asal, Magang pada instansi pemerintah dan non pemerintah, mengajar di sekolah/madrasah/pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi mandiri, riset, wirausaha, dan kegiatan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa. Kegiatan- kegiatan tersebut dapat ditawarkan seluruhnya oleh instansi pendidikan kepada mahasiswa atau hanya pada beberapa kegiatan saja menurut kesanggupan Instansi pendidikan bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, implimentasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh untuk saat ini hanya ditawarkan pada 3 program yaitu berupa kuliah pada program studi di luar Universitas Malikussaleh, kuliah pada program studi berbeda di lingkungan Universitas Malikussaleh, dan kegiatan magang pada instansi pemerintah dan non- pemerintah.

A. Kuliah pada Prodi di Luar Unimal

Pada Program MBKM, program studi Hukum memfasilitasi mahasiswa selama dua semester yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang ada diluar Universitas Malikussaleh, baik perkuliahan pada program studi di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri. Program MBKM tersebut ditawarkan pada semester III sampai dengan Semester VII yang dapat dilakukan melalui Program Mahasiswa Merdeka (*Student Exchange Program*).

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini pada semester III-V, sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Malikussaleh dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Memenuhi masa studi dan lulus mata kuliah yang dipersyaratkan;

3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi;
 4. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi;
- Mekanisme pelaksanaan program kuliah di program studi di luar Universitas

Malikussaleh adalah sebagai berikut.

1. Perkuliahan di prodi di luar Universitas Malikussaleh hanya dapat dilakukan pada perguruan tinggi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang telah mengadakan MoU atau Nota Kesepahaman dengan Universitas Malikussaleh.
2. Perkuliahan di prodi di luar Universitas Malikussaleh hanya berlaku untuk mata kuliah tertentu yang telah ditetapkan oleh Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multimode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

B. Kuliah pada Prodi Berbeda di Lingkungan Unimal

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Universitas Malikussaleh, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yaitu pada semester VI. Kegiatan perkuliahan di luar program studi dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan pada program studi sebelumnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program studi hukum yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi Hukum dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;

2. Memenuhi masa studi dan SKS yang dipersyaratkan;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.
4. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi Hukum.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi Hukum pada program studi lain yang ada di Universitas Malikussaleh atau mahasiswa program studi lain pada program studi Hukum.
2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi Hukum pada program studi lain yang ada di Universitas Malikussaleh atau mahasiswa program studi lain pada program studi Hukum.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

C. Magang

Melalui program MBKM, Program studi Hukum memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang yang dapat dilakukan selama dua semester penuh yaitu pada semester V dan semester VII. Melalui Program magang dua semester, akan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, dan instansi tempat magang mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan belajar melalui kegiatan magang pada program studi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Prodi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester ke-4 agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang

yang akan dipilih mahasiswa.

- b. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
- c. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
- d. Prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
- e. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
- f. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

D. Persyaratan dan Tugas Mahasiswa Magang

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

- a. Terdaftar pada program studi Hukum dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Memenuhi masa studi dan SKS yang dipersyaratkan;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi;
- d. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut.

Ketika akan melaksanakan magang tugas mahasiswa peserta magang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan registrasi akademik melalui web UNIMAL yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Bagi mahasiswa yang mencari sendiri tempat magangnya wajib menyerahkan

company profile calon tempat magang terlebih dahulu untuk dievaluasi oleh Program Studi beserta Formulir Permohonan Magang.

- c. Jika telah disetujui, kemudian menyerahkan formulir pernyataan kesediaan instansi tempat magang atau surat keterangan sejenis dari tempat magang selama informasi yang diberikan sesuai dengan yang diminta dalam Formulir Pernyataan Kesediaan Instansi.
- d. Menaati ketentuan jadwal kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi maupun Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- e. Melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh instansi dengan baik.
- f. Melakukan konsultasi dengan pembimbing magang minimal 8 kali (dengan minimal 4 kali tatap muka) selama proses pembuatan Laporan Magang, sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditetapkan oleh pembimbing, yang dibuktikan dengan penyerahan Formulir Bukti Konsultasi Magang (Lampiran 3) sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian presentasi magang. Proses pembimbingan dimulai selambatnya dua minggu setelah aktivitas magang dilaksanakan.
- g. Membuat Karya Akhir dalam bentuk Laporan Magang;

E. Kriteria dan kewajiban Instansi Tempat Magang

Dalam hal instansi tempat magang telah menjalin kerjasama magang dengan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, jumlah dan kriteria mahasiswa yang akan ditempatkan untuk magang dapat ditetapkan bersama antara instansi dengan program. Instansi tempat magang berhak melakukan seleksi atas mahasiswa yang akan melakukan magang.

Khusus bagi instansi yang belum menjalin kerjasama magang dengan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, prosedur penetapan instansi tempat magang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebelum ditetapkan sebagai instansi tempat magang, mahasiswa memberikan informasi (*company profile*) tentang instansi yang dituju paling lambat satu bulan sebelum hari pertama pelaksanaan magang. Pimpinan/staf Program Studi Hukum

akan mengumpulkan bukti apakah instansi tempat magang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi.

- b. Jika telah disetujui oleh Program Studi, maka mahasiswa peserta magang harus menyerahkan Formulir Kesiediaan Instansi atau surat keterangan sejenis dari instansi yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh pejabat instansi yang berwenang.
- c. Pengumuman penempatan tempat magang untuk mahasiswa yang ditempatkan oleh Program paling lambat satu minggu sebelum kegiatan magang dimulai, kecuali terdapat perubahan terkait dengan keputusan instansi tempat magang.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh instansi tempat magang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Profil Instansi atau informasi yang sejenis kepada mahasiswa calon peserta magang. Profil instansi dapat pula berupa situs web resmi instansi.
- b. Mengisi Formulir Pernyataan Kesiediaan Instansi bagi instansi yang belum menjalin kerjasama magang dengan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh atau memberikan Surat Keterangan dengan informasi yang sama dengan yang diperlukan dalam Formulir Pernyataan Kesiediaan Instansi.
- c. Melakukan koordinasi dengan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam rangka perencanaan, penempatan, pelaksanaan dan evaluasi magang.
- d. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta magang dengan koordinasi dengan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- e. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- f. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- g. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- h. Melakukan koordinasi dengan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam pemantauan dan penilaian peserta magang serta

memberikan penilaian prestasi mahasiswa peserta magang dengan mengisi formulir yang disediakan.

F. Pembimbingan Magang

Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing magang. Dosen pembimbing magang memegang peranan kunci dalam koordinasi pelaksanaan magang dengan mahasiswa peserta magang dan instansi tempat magang serta wajib memantau secara kontinu pelaksanaan magang dari mahasiswa yang dibimbingnya.

Dalam penunjukan dosen pembimbing magang, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berpedoman pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing magang diberikan sesuai dengan bidang magang yang diambil oleh mahasiswa.
- b. Memperoleh Surat Penunjukan Pembimbing Magang dari Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing magang, dosen pembimbing magang mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. Mengundurkan diri sebagai pembimbing magang dengan pertimbangan akademik atau pertimbangan lain dengan persetujuan dekan.
- b. Menerima honorium sebagaimana diatur.

Dalam hal dosen pembimbing magang telah ditunjuk, maka dosen pembimbing magang mempunyai Kewajiban.

- a. Mengarahkan mahasiswa peserta magang dalam pelaksanaan magang;
- b. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penulisan Laporan Magang;
- c. Memberikan persetujuan atas Laporan Magang;
- d. Memberikan nilai untuk laporan akhir magang dari mahasiswa peserta magang;
- e. Menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk berkonsultasi minimal delapan kali selama magang atau bimbingan penulisan, dan mengisi Formulir Konsultasi Magang
- f. Bukti konsultasi magang merupakan prasyarat untuk mengajukan ujian karya

akhir.

Pada saat pelaksanaan pembimbingan magang, mahasiswa wajib berpegang pada ketentuan pembimbingan magang, yaitu:

- a. Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum pelaksanaan magang untuk memastikan pelaksanaan magang dan penulisan Laporan Magang dapat berjalan dengan baik;
- b. Mahasiswa harus membuat Laporan Magang sesuai dengan pedoman penulisan Laporan Magang;
- c. Mahasiswa harus dapat menghargai waktu yang telah dialokasikan oleh dosen pembimbing, khususnya target waktu penyelesaian Laporan Magang yang telah ditentukan antara pembimbing dan mahasiswa dan ketepatan waktu dalam kegiatan bimbingan;
- d. Mahasiswa harus memenuhi jumlah bimbingan minimal yang telah ditetapkan.
- e. Mahasiswa harus memperhatikan etika berkomunikasi dan etika berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan;

Adapun ketentuan pembimbingan Magang yang wajib dipegang oleh Dosen pembimbing magang adalah sebagai berikut;

- a. Dosen pembimbing harus dapat memberikan masukan dan pengarahan tentang pelaksanaan magang dan penulisan Laporan Magang. Pemberian masukan dan arahan tersebut diantaranya mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut; memberikan masukan, arahan, dan mendiskusikan rumusan permasalahan dan tujuan atau topik Laporan Magang;
- b. Membuat rencana bimbingan bersama mahasiswa;
- c. Mengarahkan mahasiswa dalam hal metode penulisan ilmiah dan metode analisis dalam Laporan Magang sesuai dengan pedoman penulisan Laporan Magang yang telah disepakati;
- d. Mendiskusikan acuan materi keilmuan yang relevan dengan topik Laporan Magang;
- e. Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi Laporan Magang;
- f. Dosen pembimbing harus memastikan bahwa Laporan Magang bebas dari

plagiarisme dengan pengecekan turnitin maksimal 30% secara umum dan 3% per item.

Dalam kondisi tertentu, mahasiswa pelaksana kegiatan magang dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing magang. Pengajuan penggantian dosen pembimbing magang dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Penggantian dosen pembimbing magang harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pengajuan permohonan penggantian dosen pembimbing magang dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah magang dimulai.
- c. Penggantian dosen pembimbing magang harus dengan persetujuan dari Ketua Program Studi.

2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Penjaminan Mutu

1. Dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh akan menyusun kebijakan dan manual mutu yang terintegrasi dengan kebijakan dan penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Penyusunan kebijakan dan manual mutu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam implementasi kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka menyesuaikan dengan kebijakan dan manual mutu yang telah berlaku di Universitas Malikussaleh;
3. Selanjutnya kebijakan dan manual mutu merdeka belajar-kampus merdeka yang diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh wajib disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing dari mitra, dan mahasiswa.

B. Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
1	Kuliah di luar Universitas Malikussaleh	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi dan perguruan tinggi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)
2	Kuliah pada Program Studi lain di Universitas Malikussaleh	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi hukum untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc). Aturan lebih lanjut tentang ini akan diatur oleh kebijakan Universitas.
3	Magang	<ul style="list-style-type: none"> √ Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah). √ Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim yang terlibat secara aktif di kegiatan tim; √ Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan; √ Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan tempat magang

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam rangka implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, telah membuat mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa.

Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, setidaknya sebagai berikut:

- (1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- (2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- (3) sikap;
- (4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- (5) kemampuan membuat laporan.

c. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, Fakultas Hukum akan membuat sistem evaluasi implimentasi Merdeka belajar-Kampus Merdeka yang berupa survey online. Survey tersebut diedarkan kepada mahasiswa untuk melihat penilaian tentang kualitas progra merdeka belajar. Hal ini dapatdigunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Fakultas Hukum dalam mengembangkan program berikutnya.

d. **Relavansi Waktu Belajar Kampus Merdeka**

- (1) Hasil kegiatan mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar di luar prodi atau perguruan tinggi dihitung dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester tertentu sebagai fungsi waktu dan kegiatan perminggu dalam satu semester.
- (3) Kegiatan perkuliahan kampus merdeka belajar satu SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. 1 SKS perkuliahan, responsi, dan tutorial meliputi 5 menit tatap muka, 60 kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.
 - b. 1 SKS Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 100 menit tatap muka dan 70 menit mandiri.
 - c. 1 SKS Praktikum, praktek studio, praktek lapangan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan kegiatan lain yang sejenis meliputi 170 menit per minggu per semester.
- (4) Apabila suatu mata kuliah yang ditempuh pada suatu semester maka ia menjadi prioritas untuk diperbaiki pada semester terdekat baik ganjil

maupun genap atau melalui semester antara.

(5) Penentuan Indek Prestasi (IP)

- a. Keberhasilan akademik mahasiswa ditentukan oleh nilai rata-rata nilai indeks prestasi (IP).
- b. Indeks prestasi dibedakan antara indeks prestasi semester dengan indeks prestasi kumulatif.
- c. IP dan IPK dihitung dari mata kuliah yang terdapat dalam KRS, kecuali untuk mata kuliah yang termasuk kelompok kegiatan akhir akademik yang belum memiliki nilai.
- e. Hasil penilaian ditulis dalam skala berikut:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 - 100	A	4	Istimewa
2	80,00 - 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 - 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 - 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 - 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 - 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 - 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda



universitas
MALIKUSSALEH



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

BAB VII

PENUTUP

Demikian buku pedoman Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, sebagai acuan pemberlakuan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Tentunya disadari masih banyak hal yang perlu disesuaikan dan dievaluasi kembali, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan seiring dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Semoga dengan menerapkan pedoman ini Fakultas Hukum dapat menjadi fakultas yang unggul di tingkat internasional sesuai dengan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

2023

BUKU KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Kampus Bukit Indah
Jl. Jawa No. 1 Lhokseumawe
<http://unimal.ac.id>
Email: fh@unimal.ac.id

LAMPIRAN I

PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Tujuan

- ⇒ Mahasiswa menguraikan latar belakang (argumen/alasan) dari topik yang dipilih dalam Laporan Magang ini.
- ⇒ Latar belakang bukan menjelaskan alasan magang dan/atau alasan penyusunan Laporan Magang.
- ⇒ Latar belakang harus menunjukkan urgensi dari topik yang dipilih. Urgensi misalnya ditunjukkan oleh keunikan topik (isu mutakhir), keunikan, permasalahan atau risiko yang ditimbulkan, atau perbedaan pendapat.
- ⇒ Mahasiswa menguraikan tujuan penulisan topik magang.
- ⇒ Tujuan harus mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan di bab analisis.

BAB 2. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

A. Profil Organisasi

Apabila diijinkan oleh instansi tempat magang maka mahasiswa dapat memasukkan sub-bab profil organisasi tempat magang. Apabila mahasiswa membuat sub-bab profil organisasi mahasiswa menguraikan hal-hal berikut:

- ⇒ Mahasiswa menguraikan profil organisasi secara spesifik (unit/divisi terkait) yang menjadi konteks dari topik yang dipilih. Jika mahasiswa magang di Kantor Advokat atau Notaris, dan topik yang dipilih adalah yang terkait dengan klien dari Kantor Advokat atau Notaris tersebut, maka mahasiswa menjelaskan profil Kantor Advokat atau Notaris dengan tetap menjaga kerahasiaan nama/alamat klien.
- ⇒ Profil organisasi mencakup karakteristik organisasi yang terkait dengan topik yang dibahas, yaitu dapat mencakup struktur organisasi, proses bisnis, ketentuan/peraturan terkait, dan sejenisnya.
- ⇒ Profil organisasi juga mencakup proses penciptaan nilai untuk pemangku

kepentingan yang dilakukan oleh organisasi tersebut (misalnya melalui produk atau jasa yang dihasilkan).

- ⇒ Profil organisasi juga menjelaskan praktik manajemen dan akuntansi dalam membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya (khususnya yang terkait dengan topik yang diangkat dalam laporan ini).
- ⇒ Profil organisasi harus mempertimbangkan persetujuan pengungkapan informasi yang diberikan oleh instansi tempat magang.

Apabila mahasiswa tidak diijinkan membahas profil organisasi, maka mahasiswa membahas sebagai berikut:

- ⇒ Mahasiswa menguraikan tempat magang secara umum tanpa menyebutkan nama tempat magang.
- ⇒ Jika mahasiswa magang di Kantor Akuntan Publik atau Konsultan, maka mahasiswa maka yang dimaksud dengan tempat magang adalah divisi tempat magang di Kantor Akuntan Publik atau Konsultan.

B. Aktivitas Magang

- ⇒ Mahasiswa menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan selama magang.

BAB 3. PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

Mahasiswa menguraikan teori yang terkait dengan topik Laporan Magang.

B. Analisis

- ⇒ Mahasiswa menguraikan kasus/masalah yang menjadi topik pembahasan.
- ⇒ Uraian kasus/masalah mencakup latar belakang, substansinya, dan dampak yang ditimbulkan (jika ada).
- ⇒ Mahasiswa menganalisis kasus/masalah tersebut dengan menggunakan teori atau metode yang relevan.
- ⇒ Analisis bukan mendeskripsikan teori, namun menggunakan teori untuk menjelaskan dan membandingkan dengan kasus/masalah yang diangkat.
- ⇒ Uraian mengenai teori atau metode harus menyebutkan referensi yang valid dan handal.

BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Mahasiswa menyimpulkan pendapatnya tentang kasus/masalah yang dianalisis.

B. Rekomendasi

- ⇒ Rekomendasi terkait dengan hasil analisis di Bab 3.
- ⇒ Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap peserta magang dan terhadap staf/karyawan secara keseluruhan.
- ⇒ Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki oleh program studi yang dirasakan sebagai kelemahan yang berkontribusi pada keterbatasan mahasiswa saat magang.

BAB 5. REFLEKSI DIRI

Refleksi Diri

- ⇒ Mahasiswa memberikan penjabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat/relevan terhadap pekerjaan selama magang.
- ⇒ Mahasiswa memberikan penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan soft-skills dan kekurangan soft-skills yang dimilikinya.
- ⇒ Mahasiswa memberikan penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimilikinya.
- ⇒ Mahasiswa mengidentifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalamannya di tempat magang.
- ⇒ Mahasiswa memberikan penjabaran mengenai rencana perbaikan/pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya.